

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) merupakan salah satu kementerian yang dimiliki pemerintah yang bekerja untuk mengurus dan mengatur permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Kemenakertrans mengalami penurunan citra bahkan citra Kemenakertrans dapat dikatakan buruk oleh masyarakat akibat pemberitaan kekerasan yang dialami oleh TKI.

Dalam menangani citra, Kemenakertrans dibantu oleh humas yang dinamakan Pusat Humas Kemenakertrans. Untuk mengatasi masalah penurunan citra tersebut, pusat humas Kemenakertrans berusaha keras dengan menyusun berbagai program untuk memperbaiki citra Kemenakertrans. Kinerja pusat humas disesuaikan dan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri sehingga setiap program yang dicanangkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam praktik di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa langkah-langkah rutin yang dilaksanakan oleh pusat humas Kemenakertrans merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan isu mengenai kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia. Manajemen isu yang dilaksanakan oleh pusat humas Kemenakertrans berkaitan dengan media massa. Media massa, baik media cetak, online maupun

elektronik dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengelola dan menekan isu yang beredar di masyarakat.

Jangkauan media yang luas dan mudah diakses masyarakat, membantu Kemenakertrans untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Kemenakertrans telah mengambil usaha dan langkah-langkah maksimal dalam menangani permasalahan kekerasan yang dialami oleh TKI. Oleh karena itu setiap acara yang dilaksanakan, pusat humas Kemenakertrans akan mengundang wartawan dari berbagai media untuk meliput dan diharapkan akan menuliskan berita positif mengenai Kemenakertrans yang akhirnya akan menekan isu yang mengenai Kemenakertrans yang beredar di masyarakat..

Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwa walaupun humas Kemenakertrans telah menjalin hubungan baik dengan media, namun tetap terdapat permasalahan dalam pemuatan berita di media massa. Berita yang dimuat media massa terkadang berbeda dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Humas Kemenakertrans yang berharap dengan hubungan baik ini, wartawan akan selalu melakukan kroscek mengenai isi berita sebelum naik cetak, tetapi tetap saja jarang terdapat wartawan yang melakukan kroscek ulang tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, peneliti memiliki saran untuk hasil penelitian ini, yakni :

1. Saran Akademis

Data yang diperoleh peneliti masing kurang mendetail, hal ini dikarenakan peneliti hanya menggunakan wawancara narasumber sebagai data. Ada baiknya dalam penelitian untuk mengetahui mengenai langkah-langkah manajemen isu, peneliti mengikuti proses kerja dari awal hingga akhir untuk mendapatkan data secara lengkap mengenai proses manajemen isu.

2. Saran Praktis

Dalam melaksanakan manajemen isu, ada baiknya Humas Kemenakertrans memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki organisasi dan tidak bergantung pada hubungan baik dengan media massa karena dalam penelitian ditemukan bahwa hubungan baik dengan media tidak menjamin akan adanya kroscek berita dengan wawancara yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Alifahmi, Hifni. 2008. *Marketing Communication Orchestra*. Bandung : Examedia Publishing
- Ardianto, Elvinaro dan Soleh Soemirat. 2004. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Coulson-Thomas, Colin. 1996. *Public Relations : Pedoman Praktis Untuk PR*. Jakarta : BUmi Aksara
- Cutlip, Scott M., Center H. Allen & Broom M. Glen. 1985. *Effective Public Relations*. Edisi keenam. New Jersey : Prentice Hall International Inc.
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Human Relations dan Public Relations Dalam Manajemen*. Bandung : Mandar Maju
- _____. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung : Mandar Maju
- Moore, H. Frazier. *Hubungan Masyarakat Prinsip, Kasus, dan Masalah*. 1987. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moore, Frazier H. 2000. *Hubungan Masyarakat*. Bandung : Remaja Karya
- Nova, Firsan. 2011. *Crisis Public Relations*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Poerwandari, E. Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : LPSP3 FP-UI
- Ruslan, Rosady. 1997. *Kampanye Public Relations*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Ruslan, Rosady. *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi)*. 2001. Jakarta : Grafindo

Ruslan, Rosady. 2003. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta : Grafindo

Wasesa, Silih Agung. 2005. *Strategi Public Relations*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Referensi Internet

<http://manajemenkomunikasi.blogspot.com/2011/02/krisis-dalam-public-relations.html>

<http://www.ancok.staff.ugm.ac.id/h-12/kiat-menghadapi-krisis-dalam-perusahaan.html>

Marshall dan Rossman. Kabalmay. 2002

www.persatuanmahasiswariaumalaysia.com

www.suarakarya.com

www.tribunnews.com

www.kemenakertrans.go.id

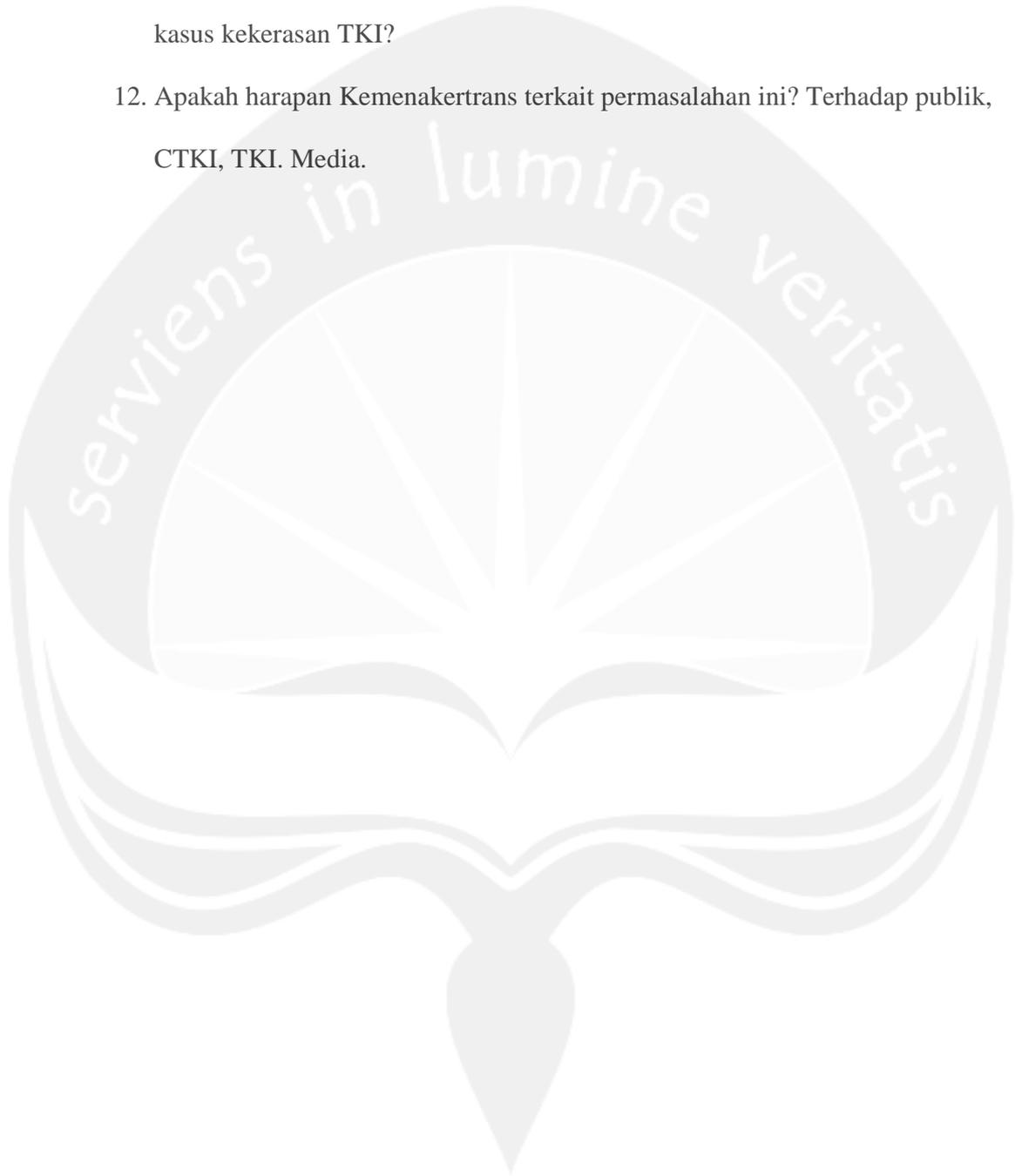
<http://www.indopos.co.id/index.php/index-tki-sukses/14978-perjuangkan-buruh-migran-s2-di-jerman-ingin-jadi-dosen.html>

LAMPIRAN I

INTERVIEW GUIDE :

1. Bagaimana posisi humas di Kemenakertrans?
2. Menurut Anda, bagaimana peran humas paling ideal untuk organisasi pemerintah khususnya Kemenakertrans?
3. Apakah humas Kemenakertrans bekerja menurut undang-undang? Contoh!
4. Terlepas dari kasus pemberitaan kekerasan TKI, bagaimana citra Kemenakertrans di mata masyarakat? Darimana mengetahui hal tersebut?
5. Bagaimana sikap Kemenakertrans dalam pemberitaan kekerasan TKI di media massa? Apa pengaruh pemberitaan tersebut terhadap organisasi?
6. Apakah Kemenakertrans mengetahui tanggapan dan reaksi masyarakat atas pemberitaan-pemberitaan tersebut? Darimana? Bagaimana cara mengetahuinya?
7. Bagaimana humas Kemenakertrans sebagai wakil organisasi menjawab tanggapan-tanggapan masyarakat yang negatif?
8. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Humas Kemenakertrans untuk mengubah persepsi masyarakat atau paling tidak mengurangi hal tersebut?
9. Dalam hal tersebut, siapa yang berwenang dalam mengatasi masalah pemberitaan kekerasan terhadap TKI?
10. Langkah-langkah apa saja yang telah atau sedang dilakukan terkait pemberitaan kekerasan terhadap TKI?

11. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh humas Kemenakertrans terkait dengan kasus kekerasan TKI?
12. Apakah harapan Kemenakertrans terkait permasalahan ini? Terhadap publik, CTKI, TKI. Media.



Lampiran II

Hasil wawancara

Tanggal 01/11/2011

Narasumber I

Q : Selamat pagi, Bu. Boleh ngobrol-ngobrol seputar humas Kemenakertrans?

A : Boleh, Tanya saja. Santai aja kalo sama saya

Q : Kemenakertrans itu menangani bidang apa saja, Bu?

A : Kemenakertrans itu kepanjangannya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dua bidang yang ditangani yakni bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian

Q : Apakah Itu termasuk masalah tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri ?

A : Iya, betul. Kemenakertrans yang menyusun peraturan untuk masalah ketenagakerjaan, tetapi tidak melaksanakan pengirimannya. Kami bekerjasama dengan beberapa organisasi dalam pelaksanaannya. Kan tidak mungkin kalau kami yang membuat peraturan, tetapi kami juga yang melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, nanti bisa dibilang tidak berimbang.

Q : Berarti lembaga atau organisasi yang melaksanakannya itu apa, Bu?

A : Ada beberapa, kami bekerjasama dengan suatu Badan yang disebut BNP2TKI juga Abjati. Tapi badan tersebut tidak berada di bawah Kemenakertrans, mereka berdiri sendiri.

Q : Abjati itu apa, Bu?

A : Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, itu gabungan seluruh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemenakertrans memonitor mereka dalam pengiriman para TKI ke luar negeri, bisa dibilang itu adalah jalur legalnya. Karena mereka terdaftar dan didata di perusahaan tenaga kerja ini. Seandainya terjadi sesuatu, semua tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Luar Negeri mendapat asuransi.

Q : Kalau yang ilegal itu bagaimana, bu?

A : Nah, yang ilegal itu perusahaan penyedia tenaga kerja yang tidak terdaftar, jadi para tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri tidak mendapat asuransi, selain itu disebut ilegal karena TKI tersebut tidak mempunyai dokumen yang syah, misalnya KTP-nya palsu, terkadang umur juga dipalsukan.

Q : Berarti kalau kasus yang diberitakan mengenai kekerasan TKI itu yang ilegal atau legal, bu?

A : Kebanyakan illegal, yang membuat bingung itu kan karena mereka tenaga kerja illegal tapi minta diperlakukan sama dengan yang legal, minta hak yang sama. Itu yang membuat pemerintah pusing sebenarnya.

Q : Memang bedanya TKI legal dan illegal dimananya, bu?

A : Masalah asuransi, dan persiapannya. Yang melalui jalur legal itu mendapat pelatihan terlebih dahulu, pelatihan 200 jam kalau tidak salah, pelatihan teknologi, bahasa, dan pembelajaran budaya. Pasti berbeda dong, budaya luar dan budaya Indonesia. Untuk yang ke daerah Timur Tengah saja pakaiannya berbeda. Sama-sama berjilbab, tapi disana kan betul-betul tertutup, pakaiannya gombong-gombong. Lha di sini berjilbab tapi bajunya ketat-ketat (sambil memperagakan dan tertawa). Nah yang illegal itu, bayar langsung berangkat, jadi tidak terdaftar di sini. Begitu sampai sana kaget, beda bahasa, beda budaya. Majikan ngomong apa, TKI-nya nggak ngerti. Ya mau gimana? Padahal yang legal saja susah, memahami teknologi yang ada disini apalagi di sana, Negara Indonesia jauh ketinggalan. Di tempat pelatihan diajarkan menggunakan mesin cuci yang sistemnya berbeda dengan disana, disini masih harus pakai beberapa tombol, disana sudah *one touch* untuk semua fungsi. Tapi yang jelas berbeda, itu saja sudah dapat menjadi pemicu adanya kekerasan terhadap TKI, dianggap tidak dapat bekerja. Untuk TKI legal, jika mereka mengalami kekerasan, gaji tidak di bayar, dsb pemerintah memberikan ganti rugi untuk mereka, namun TKI yang illegal jika mendapat masalah yang sama, Pemerintah Indonesia tidak berkewajiban memberikan ganti rugi.

Q : Sebelum mengaitkan dengan masalah akibatnya terhadap citra Kemenkertrans, bagaimana posisi humas di Kementrian?

A : Posisi humas di Kemenakertrans ini berada di bawah Sekjen, Menteri di atas Sekjen, humas di bawahnya Sekjen. Namanya disini adalah Pusat Humas. Karena di bawah Sekjen ada berbagai macam Biro, seperti biro perencanaan, biro kepegawaian humas salah satu di antaranya. Humas itu ekselon II, ekselon I nya Sekjen.

Q : Apakah posisi tersebut sudah ideal?

A : Kalo menurut saya Seluruh humas di Kementrian belum ideal, karena humas yang ideal itu seharusnya langsung di bawah menteri. Karena humas yang baik adalah humas yang langsung berada di bawah pimpinan, seperti humas di perusahaan-perusahaan, humas berada langsung di bawah pimpinan. Tidak memiliki atasan lagi, pimpinan mau apa, punya kebijakan apa, humas yang pertama kali tahu

Q : Lalu bagaimana peran humas di Kementrian ini?

A : Peran humas masih kecil, sudah menjadi lebih baik. Ada yang namanya pencitraan, kalau ada banyak berita buruk, humas yang menanganinya. Ada berita buruk kita buat running text, kita buat tv magazine di rcti, metro Tv, dan anTv, kita produksi untuk juga menampilkan berita positif tentang TKI, bukan hanya berita buruk. Banyak TKI sukses di Jepang, ada yang juga sukses dari Kaltim, dia juga sukses. Kami yang membuat dan memproduksinya lalu ditayangkan di televisi.

Q : Oh begitu...nah kalo dikaitkan dengan citra Kemenakertrans sendiri, bu. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai masalah kekerasan TKI ini?

A : (tersenyum) kurang baik, bisa dibilang buruk deh.

Q : Tahu hal tersebut darimana, bu? Koran, atau wawancara?

A : Kebanyakan dari Koran sih, kan kami juga bekerjasama dengan beberapa media, kan suka ada pojok sms nya tuh, dari situ banyak komentar-komentar dari masyarakat. Komentar-komentarnya itu ya kebanyakan menyalahkan pemerintah. Apalagi kasus yang TKI tidur di kolong jembatan itu. Di Jeddah, Khandara. Masyarakat itu kan ngertinya pemerintah mendiamkan padahal ya tidak. Kami juga melihat dari metro tv sama tv one, mereka punya telepon interaktif, tanggapan mereka mengenai berita, darisitu kita bisa mengetahui respon masyarakat terhadap kasus ini. Dan semua berita terkait pasti kami kliping, dari situ kami tahu tanggapan masyarakat. Kami juga berusaha dengan membuat tv magazine, adveretorial, running text, untuk mencounter berita tersebut bahwa di antar 10 orang yang berangkat, mungkin hanya 2 atau 3 orang yang mengalami kekerasan, sissanya berhasil, tapi kenapa tidak pernah di beritakan.

Q : Memangnya untuk kasus itu sebetulnya bagaimana, bu?

A : Nah, ribuan TKI yang terlantar disitu, panjang ceritanya. Ada yang visa kerjanya habis, ada yang illegal, ada pula yang bukan TKI dalam artian mungkin liburan, atau mereka-mereka yang umroh tapi nggak bisa pulang karena hanya beli

one-way ticket, ada pula yang bilanganya umroh tapi ternyata malah bekerja di sana. Jadi kedoknya umroh, padahal tidak. Padahal yang mendapat asuransi ya hanya TKI yang terdaftar secara legal. Semuanya numpuk jadi satu disitu.

Q : Lho nggak ke kedutaan aja , bu?

A : Nah, kedutaan itu sudah penuh juga, nggak cukup kan untuk menampung semua, harus ngasih makan pula. Dana kan juga terbatas. Masalahnya adalah mereka semua minta dipulangkan serentak, itu kan tidak bisa juga. Maka kami pulangkan bertahap. Awalnya mereka sengaja tinggal disitu, karena nanti ditangkap polisi lalu dipulangkan secara gratis. Tapi lama-lama pemerintah sana curiga. Akhirnya didiamkan, tapi kan jadinya risih karena mengganggu kenyamanan disana, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya membereskan masalah ini. Nah, kalo bicara masalah citra, masyarakat itu kan ada yang memang tahu permasalahannya ada juga yang tidak tahu, tapi semuanya sama-sama menuntut pemerintah dan bilang pemerintah tidak mempedulikan TKI. Padahal sebenarnya tidak begitu. Sekarang ini kami sedang berusaha meminjam pesawat milik AU, kan juga tidak bisa langsung asal pinjam, ada ijin dan prosesnya.

Q : Lalu keadaannya sekarang bagaimana, Bu?

A : Yah sekarang sedang kami usahakan untuk memulangkan semua warga Negara Indonesia disana, terlepas mereka TKI atau bukan. Yang pasti memang butuh waktu lama, dana dari pemerintah kan juga terbatas.

Q : Sebelum bertanya lebih lanjut mengenai kasus tersebut, bagaimana kinerja humas pemerintah ? Karena pasti berbeda dengan humas perusahaan.

A : Ya, ada Undang-Undang yang mengatur kinerja humas pemerintah. Semuanya diatur dalam Permen no 17, hal-hal apa saja tugas pokok dan fungsi humas. Humas membuat rilis, humas melaksanakan kegiatan dengan DPR, dengan pemerintah daerah, dengan departemen lain.

Q : Apakah ada perkumpulan humas sendiri untuk di kementrian, Bu?

A : Ada, namanya Bakohumas, seluruh humas di Kementrian atau lembaga Negara berkumpul di dalam Bakohumas ini untuk mensosialisasikan produk-produk baru ataupun kasus-kasus yang sedang terjadi di dalam Kementrian. Seluruh humas di DKI hadir terutama dari pemerintah,

Q : Bagaimana dengan komunikasi dengan media?

A : Biasanya kami mengadakan Konferensi pers, sekarang ada yang namanya Media Briefing, kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai acara yang akan diselenggarakan. Kalo Konfres untuk mengcounter atau menjelaskan isu-isu yang terbaru. Konfres lebih pada Menteri yang berbicara atau kapus Humas. Kalo media briefing yang berbicara unit teknis, humas berperan sebagai fasilitator.

Q : Berarti untuk masalah pemberitaan TKI yang negatif ?

A : Ya penjelasannya mengenai hal tersebut kita mengadakan konferensi pers, running text di televisi, kita juga buat advertorial di Koran di IndoPos namanya TKI SUKSES. Rubrik khusus setiap minggu untuk berita TKI yang sukses. Mungkin jumlahnya lebih banyak daripada TKI yang disiksa, tapi nyatanya yang paling banyak diekspos justru yang berita buruk

Q : Kembali ke masalah citra, Bu dengan keadaan seperti itu apa saja sih upaya dari humas Kemenakertrans ini untuk memperbaiki, paling tidak mengubah persepsi masyarakat yang seperti itu?

A : Kalau untuk mengubah seperti itu ya susah sekali ya. Ada beberapa hal yang sedang kami lakukan, seperti press tour, dialog di metro tv, pernah juga dialog di radio dengan TKI illegal dengan TKI yang sudah berhasil di luar negeri. Kebanyakan TKI yang berhasil itu di Hongkong, diharapkan karena mereka sesama TKI, akhirnya mengerti bahwa jalur legal lebih baik daripada illegal walaupun prosesnya memang lama.

Q : Apakah pemberitaan tersebut berpengaruh terhadap Kemenakertrans ?

A : Sangat berpengaruh, kinerja kita kan dinilai presiden, kalau dianggap tidak berhasil berarti kita dianggap tidak bisa bekerja.

Q : Lalu saya pernah membaca di Koran, pernah ada kunjungan menteri ke keluarga TKI yang mengalami kekerasan, itu humas yang mencanangkan kegiatan tersebut?

A : Oh iya, kerjasama dengan beberapa pihak tentu. Karena ada LSM yang khusus concern dengan para TKI namanya Migran Care. Kami juga rutin mengadakan dialog dengan mereka jadi ada dari Kemenakertrans, Abjati dan juga pihak Migran Care.

Q : Hmm..lalu mengenai upaya humas seperti dialog di tv dan radio, sudah berhasil belum, Bu? Bagaimana dengan website Nakertrans?

A : Kalau berhasil itu belum, karena harapan kami belum tercapai, dalam artian target kami yang bertanya langsung ketika dialog berlangsung itu para calon TKI tapi sayangnya telepon-telepon yang masuk itu dari masyarakat yang akhirnya malah menanyakan masalah-masalah TKI. Padahal harapan kami yang akan menelepon itu para calon TKI dan mereka bertanya secara langsung serba-serbi untuk menjadi TKI, apa saja yang harus dilalui, dsb. Website juga menurut saya belum memenuhi kriteria untuk sebuah website, kurang menarik jadi masyarakat kurang memanfaatkannya. Yang mendesain website itu dari Balitfo, dan kurang kerjasama karena masing-masing berpikir ini bagian mereka, padahal yang ideal itu kan humas dan balitfo bekerjasama jadi berita-berita juga update. Yang paling ideal malah seharusnya website ya dipegang humas sendiri, supaya betul-betul berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Q : Kalau belum berhasil seperti itu, ada kegiatan lain, Bu? Supaya tepat sasaran?

A : Sementara cara yang paling efektif itu pergi ke daerah-daerah asal para TKI untuk mengadakan dialog langsung disana. Kemarin kami pergi ke NTB dan Jatim yang merupakan daerah pengirim TKI terbanyak.

Q : Pernah melakukan semacam kampanye, Bu?

A : Kalau kampanye belum pernah, ya sepertinya terlalu besar, paling ya dialog ke daerah-daerah dan dialog di tivi itu. Kegiatan yang kami lakukan sekarang itu kami akan mengadakan Press Tour. Diharapkan ketika media juga ikut serta dalam proses, mereka juga akan memberitakan hal yang baik, dan memberitakan usaha sesungguhnya dari kementerian untuk mengatasi masalah ini.

Q : Berarti memang humas yang merencanakan berbagai program dalam rangka memperbaiki citra Kemenakertrans ini, ya, Bu?

A : Iya, tapi untuk yang betul-betul terkait dengan TKI, itu dilaksanakan oleh badan yang lain, Binapenta, unit aktif dari Kemenakertrans.

Q : Bagaimana dengan masalah penggelapan uang asuransi Bu? Apakah terkait dengan Kemenakertrans?

A : Itu terkait dengan PJTKI, tapi tetap Ada kaitannya dengan kita karena kita yang membuat undang-undang, karena hanya PJTKI tertentu dan hanya asuransi tertentu yang bisa mengcover, sementara yang lain tidak diakui, Karena pemerintah telah menjamin, mereka sudah punya link di Negara-negara tujuan sehingga jika

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, uang gampang keluar. Padahal kami ingin para TKI cepat mendapat gantinya. Masalah yang utama itu adalah masalah komunikasi. Karena perusahaan asuransi tersebut tidak bisa masuk list, maka mereka membuat berita, mencari-cari kesalahan.

Q : Lalu bagaimana mengcover ke masyarakat, Bu?

A : Itu sudah kami buat, pernah ada pameran di Balai Kartini. Mensosialisasikan mengenai hal ini. Nanti kita akan buat kegiatan serupa di acara ASEAN fair di Bali. Ini acara pengenalan produk dalam negeri yang bisa dijual di luar negeri. Menjelaskan melalui buklet, leaflet. Kalo Asean fair kan memang program tahunan, tapi berhubung tahun ini acara tersebut diadakan di Indonesia ya dimanfaatkan. Bisa menjelaskan ke Negara-negara tetangga mengenai kasus yang terjadi. Nanti juga ada Naker expo dari job fair, pameran foto, lomba menulis untuk wartawan dan lomba foto untuk wartawan. Acara tersebut dibuka untuk umum. Biasanya kami mengikuti pameran, bukan mengadakan kegiatan kecuali Nakertrans expo ini. Tanggal 8-9 Desember.

Q : Apakah ada langkah-langkah khusus untuk memperbaiki citra Kemenakertrans ini, Bu??

A : Untuk pemberitaan masalah TKI kami bawa semua wartawan tadi pagi untuk acara penjemputan TKI di bandara. Kami juga membuat rilis ke media mengenai kasus TKI di Jeddah bagaimana proses pengirimannya.

Q : Berarti kegiatan untuk mengatasi permasalahan TKI ini tidak disusun per tahun ya Bu?

A : Kalo advertorial dan penulisan artikel kami sudah susun dalam program tahunan. Berita apa yang ingin dimuat dan ke media mana, biasanya kami bawa wartawan ke kantong-kantong TKI di NTB, itu salah satu kegiatan kami, press tour namanya. Kami membawa ke wilayah-wilayah kantong TKI. Kalo peliputan itu tidak bisa diatur karena mengikuti kegiatan menteri. Nah kalau masalah kasus TKI, itu semuanya dadakan, begitu kasus mencuat, langsung disusun langkah-langkah, dan semua personil humas terlibat, untuk mengcover berita semuanya humas yang lakukan.

Q : Sebetulnya bagaimana pengertian strategi itu sendiri bagi humas Kemenakertrans, Bu ?

A : Ya itu tadi ya. Langkah-langkah maupun upaya dari kami yang nantinya direalisasikan dalam program kerja seperti mengundang wartawan, dialog di media. Nanti bisa di lihat di buku panduan umum, di situ juga dijelaskan.

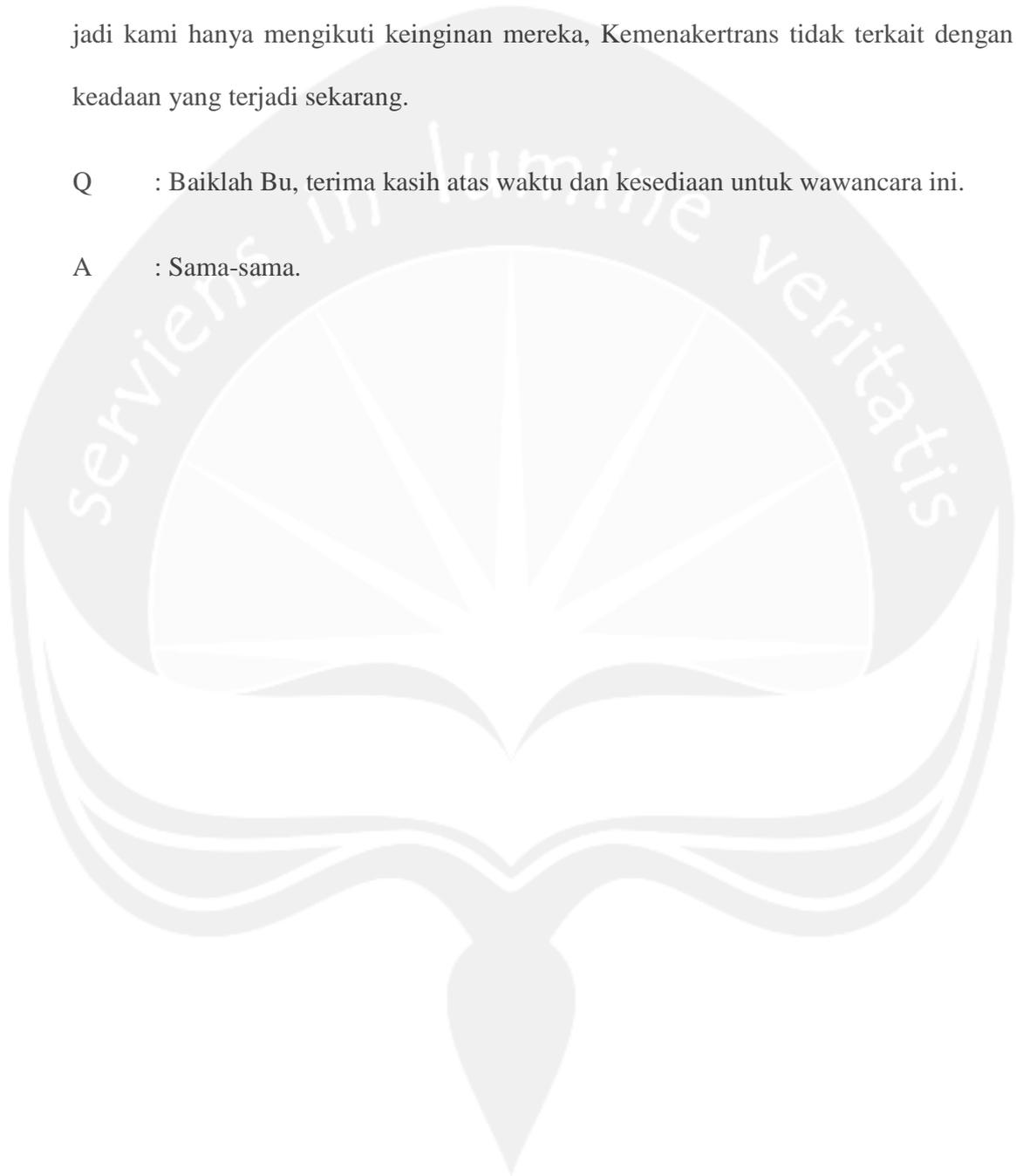
Q : Dalam kasus pembebasan Darsem, itu bagaimana prosesnya bu?

A : Itu adalah kerja maksimal dari PJTKI, Kemenakertrans dan Kemenlu. Ketika darsem akhirnya bebas, uang koin peduli Darsem kami kembalikan ke masyarakat, tapi kata mereka untuk Darsem ya kami kasih ke Darsem. Mereka menyalurkannya lewat LSM. Namanya Migran Care. Walaupun pada akhirnya Darsem sepertinya

menjadi orang kaya mendadak, tetapi ya itu sudah menjadi keputusan masyarakat, jadi kami hanya mengikuti keinginan mereka, Kemenakertrans tidak terkait dengan keadaan yang terjadi sekarang.

Q : Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk wawancara ini.

A : Sama-sama.



Hasil Wawancara 01/11/2011

Narasumber II

Q : Selamat pagi pak. Boleh saya mengajukan pertanyaan seputar kinerja humas?

A : Silakan, mbak

Q : Tugas dan kewajiban untuk sub bidang media massa ini bagaimana pak?

A : Disini kami mengecek berita setiap hari dari banyak media massa yang berbeda, baik cetak maupun online. Setelah itu, berita-berita yang kami kumpulkan akan dianalisis oleh bagian analisis.

Q : Berarti setiap bagian saling berkaitan dan bekerjasama ya pak?

A : Ya, betul.

Q : Selain itu apa lagi pak?

A : Kami menjadi penghubung dari setiap departemen yang ada di Kemenakertrans jika ingin mengundang media, misalkan ada yang mengadakan seminar, kami yang menghubungi media dan membuatkan press release-nya.

Q : Bagaimana kaitannya dengan pemberitaan kasus kekerasan TKI, pak?

A : Soal itu, kami juga melakukan agenda setting, bukan hanya media saja. Ketika berita itu muncul, kami berikan lagi berita yang lain untuk menutup berita

sehingga pemberitaan buruk menurun. Mengalihkan berita dengan berita lain. Kami juga tahu kira-kira berita apa yang muncul karena hubungan yang baik dengan media.

Q : Apa saja yang dilakukan oleh pusat humas untuk menjalin hubungan yang baik dengan media, Pak?

A : Banyak kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan media, mbak. Ruangan ini salah satunya, namanya press room, ruangan khusus wartawan. Ada wifi supaya wartawan bisa mengakses internet dengan mudah, ada pula ruangan computer berisi data-data mengenai Kemenakertrans, wartawan yang butuh berita bisa langsung mengakses dari sana. Kadang kami juga berolahraga seusai jam kerja, itu kami sediakan meja ping-pong, juga loker pribadi untuk menyimpan barang-barang supaya aman”.

Q : Apa keuntungan untuk Kemenakertrans, Pak?

A : Banyak, mbak. Salah satunya kami diberitahu jika ada berita penting seputar Kemenakertrans karena mereka langsung mengkonfirmasi kepada kami.

Q : tapi bagaimana jika ada pegawai yang diwawancarai langsung oleh media, Pak?

A : Kalo itu, kami biasanya mengedarkan surat pemberitahuan kepada setiap biro untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Dalam situasi apapun khususnya darurat, humas menjadi satu-satunya jalan keluar informasi, dan seluruh karyawan telah diberitahu melalui surat pemberitahuan untuk tidak menjawab awak media kecuali jika media tersebut bertanya kepada humas.

Q : Supaya semua satu suara ya, Pak?

A : Benar, Mbak. Dalam situasi tersebut, satu suara sangat penting agar klarifikasi jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Q : Pernah ada masalah dengan media tidak, Pak?

A : Belum pernah, biasanya hanya masalah pemuatan berita. Mereka wawancaranya apa, tapi yang dimuat berbeda.

Q : Apa yang diharapkan humas dengan situasi seperti itu, Pak?

A : Sebisa mungkin ada kroscek sebelum berita dimuat supaya kami tahu, yang mereka tulis sesuai dengan wawancara.

Q : Bagaimana dengan masyarakat, Pak? Mengenai keluhan atau tanggapan mereka mengenai kasus kekerasan itu?

A : Kami memiliki pojok sms langsung, masyarakat sms di nomor hotline, lalu kami akan menjawabnya.

Lampiran III

Foto-foto

Peneliti saat sedang mewawancarai Ibu Nur Widiati, Staf pusat humas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi





Acara
Nakertrans
Expo 8-9
Desember
2011



Pameran
foto dalam
Nakertrans
Expo 2011



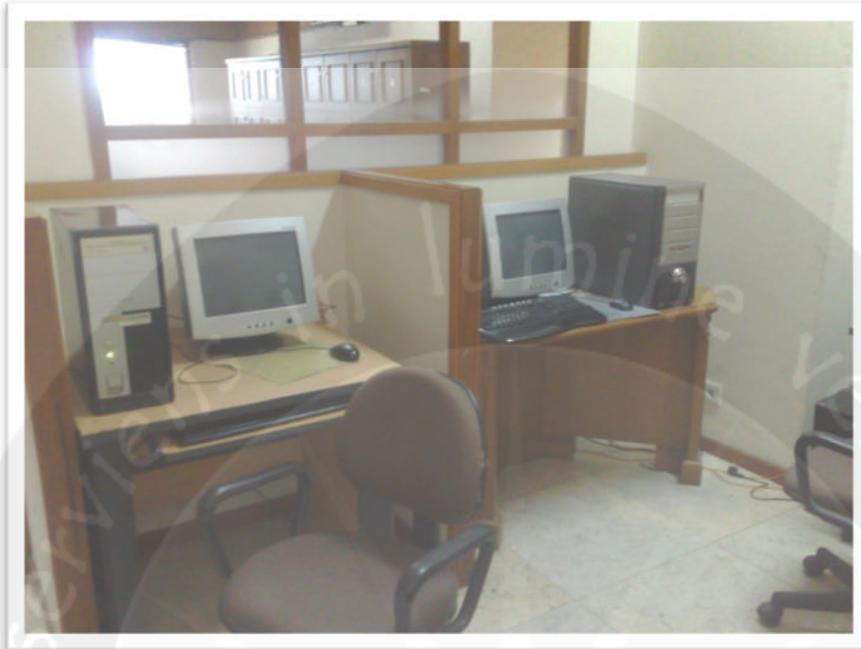
Pop Up di Hall Gedung Pusat Kemenakertrans





Suasana Ruang Wartawan di Gedung Pusat Kemenakertrans





Ruang komputer, para wartawan bebas mengakses data seputar Kemenakertrans

Hasil Kliping Pusat Humas Kemenakertrans



Lampiran IV

Artikel Nakertrans Expo 8-9 Desember 2011

KOMPAS.com 
Best Newspaper
Website in Asia

Rabu, 18 Januari 2012 | 00:16 WIB

<a



Kompas/Hamzirwan Pembukaan Naker Expo, Kamis (8/12/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, membuka Nakertrans Expo 2011 di halaman Gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (8/12/2011).

Pameran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini diikuti seluruh dinas tenaga kerja provinsi, unit pelaksana teknis Kemnakertrans di seluruh Indonesia, dan kalangan pengusaha.

Pameran akan berlangsung sampai dengan Sabtu (10/12/2011), yang diisi dengan penyerahan penghargaan kepada jurnalis pemenang karya tulis dan foto, mobil pelatihan kerja dan mobil tanggap darurat kepada Gubernur Kalimantan Timur,

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, serta peralatan lain kepada Bupati Sukabumi dan Bupati Kebumen.

Mennakertrans juga melepas alumni balai latihan kerja (BLK) yang akan ditempatkan di sejumlah perusahaan.

(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/08/16141323/Muhaimin.Buka.Naker.Expo>)



BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah)



Menakertrans Buka Kegiatan Nakertrans Expo 2011

9 December 2011 - 15:12

(Jakarta) -Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,Muhaimin Iskandar, secara resmi membuka kegiatan Nakertrans Expo 2011 yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 8-9 Desember 2011 yang berlangsung di kantor Kemnakertrans, Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta.

Kegiatan Nakertrans Expo 2011 yang bertema “Menjalin Mitra Meretas Citra” merupakan ajang promosi, informasi, publikasi dan dokumentasi hasil upaya kegiatan yang sedang dilakukan dan yang telah dilaksanakan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

“Dengan terselenggaranya Nakertrans Expo 2011, diharapkan dapat menjadi wahana dalam menjalin hubungan baik antara Kemnakertrans dengan seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah yang menampilkan expose program-program unggulan,” kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan selama ini pemerintah pusat dan daerah telah memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program kerjanya.

Rangkaian kegiatan Nakertrans Expo 2011 yang diprakarsai Pusat Humas Kemnakertrans dan didukung seluruh unit teknis terkait baik pusat maupun daerah, menampilkan beberapa kegiatan diantaranya expose program unggulan bidang nakertrans, dialog bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, lomba penulisan jurnalistik dan pameran foto nakertrans,

Ada juga pemberian penghargaan dan workshop penilaian kinerja pelayanan publik tingkat nakertrans, presentasi hasil penelitian ketransmigrasian, penyerahan Mobil Training Unit serta pelepasan Mobil Tanggap Darurat.

Kegiatan Nakertrans Expo 2011 ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Unit-unit Kemnakertrans : 14 Unit yang terdiri dari SEKRETRAIAT JENDERAL (Pusat Humas, - Perencanaan Tenaga Kerja, Biro Perencanaan, Pusat K3), DITJEN BINALATTAS, DITJEN BINAPENTA, DITJEN PHI & JAMSOS, DITJEN PPK, DITJEN P2Ktrans, DITJEN P2MKT, BALITFO, UPTP BLKI Makassar, UPTP BLKI Banda Aceh, UPTP BBLKI Medan, UPTP B2PTKLN Cevest, UPTP B2PTKDN Bandung, Balatrans (Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Jakarta, DIY).

Sedangkan Dinas Daerah yang berpartisipasi : Disnakertrans Provinsi Jambi, Dinakertrans Provinsi Lampung, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Disnakertrans Provinsi Banten, Disnakertrans Propinsi Kalimantan Barat, Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, Disnakertrans Provinsi Maluku, Disnakertrans Provinsi Papua. (humas)

<http://bakohumas.kominfo.go.id/index.php?nid=978>

Tekan Urbanisasi, Kemenakertrans Pacu Pelatihan Kerja di Pedesaan

Kamis, 8 Desember 2011 17:13 wib



Ilustrasi.

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berkomitmen menekan tingkat urbanisasi, salah satunya dengan memperluas lapangan pekerjaan, memacu kegiatan ekonomi pedesaan dan mengembangkan usaha kecil dan industri rumah tangga di pedesaan.

“Pemerintah tetap berkomitmen dan konsisten dalam membantu dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, produktif melalui program pelatihan dan subsidi program untuk mengurangi pengangguran di daerah-daerah,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat membuka penyelenggaraan Nakertrans Expo 2011, di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Kamis (8/12).

Untuk keperluan itu, pihaknya memberikan bantuan paket pelatihan Competency Base Training (CBT) sebanyak 142 paket untuk 142 BLK pusat dan daerah. Selain itu, ada juga delapan Mobile Productivity Consultancy (MPC) / kendaraan konsultasi produktivitas keliling untuk delapan Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD).

“Untuk program pelatihan lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat langsung adalah subsidi program berupa peralatan pelatihan dan program pelatihan 1.563 Lembaga pelatihan Kerja (LPK). Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” paparnya.

Muhaimin optimis program-program pelatihan kerja memiliki nilai strategis dan berperan penting untuk memberdayakan SDM di daerah.

"Melalui pelatihan kerja, maka keterampilan dan kompetensi pada calon tenaga kerja dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di bidang jasa, pertanian, industri dan lainnya," terangnya.

Dalam pembukaan Nakertrans Expo 2011 ini, Muhaimin Iskandar menyerahkan bantuan Mobile Training Unit (MTU) yang digunakan untuk pelatihan kejuruan para pencari kerja dan mobil tanggap darurat yang digunakan untuk kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.

Bantuan MTU dan mobil tanggap darurat ini diberikan kepada gubernur, walikota/bupati, serta dinas-dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi di seluruh Indonesia.

Muhaimin menjelaskan penyerahan bantuan MTU ini merupakan bagian dari penyerahan 110 unit MTU yang diberikan kepada 110 Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan daerah pada tahun anggaran 2011.

"Bantuan MTU ini dapat digunakan untuk melatih para lulusan pendidikan dan calon tenaga kerja yang berminat mengembangkan keterampilan, keahlian dan bakatnya dalam bidang kejuruan listrik, las, Sepeda motor, pertanian, menjahit dan bordit serta bangunan," pungkasnya. **(nia) (Iman Rosidi (Sindo Radio)/Sindoradio/rhs)**

<http://economy.okezone.com/read/2011/12/08/320/539852/tekan-urbanisasi-kemenakertrans-pacu-pelatihan-kerja-di-pedesaan>

Lampiran V

Website Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

The screenshot shows the website of the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration (Kemnakertrans). The browser address bar displays <http://www.depnakertrans.go.id/>. The page header includes the ministry's logo and name: **KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA** (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia). The date **18 January 2012** is shown in the top right corner.

The main content area features a news article titled **Berita Terbaru** (Latest News) with the headline **Kemnakertrans Targetkan Menarik 11.000 Pekerja Anak** (Kemnakertrans Targets Attracting 11,000 Child Workers) dated **17 Jan 2012**. The article text states: "Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan penarikan sebanyak 11.000 orang pekerja anak. Para pekerja anak itu akan ditarik dari tempat kerja kemudian melalui proses pendampingan di shelter untuk mempersiapkan anak kembali ke dunia." A **selengkapnya** (read more) link is provided below the text.

The sidebar on the left contains a **Menu** (Menu) with the following items: **Tentang Kemenakertrans**, **Unit Kerja**, **Peraturan Perundangan**, **Perencanaan Tenaga Kerja**, **Hasil Penelitian Ilaker**, **Hasil Penelitian Trans**, **Data dan Informasi Ketenagakerjaan**, **Data dan Informasi Ketransmigrasian**, **Layanan Publik**, **Informasi Lainnya**, **FAQ**, and **Forum**.

The sidebar on the right includes a **Menakertrans** section with a photo of a man, a **Search** box, and a **Layanan Online** (Online Services) section with links for **Informasi Pasar Kerja** and **TKA Online**.

At the bottom of the main content area, there are two tabs: **Tenaga Kerja** (Manpower) and **Transmigrasi** (Transmigration).

Lampiran VI

Artikel TKI Sukses INDOPOS

INDOPOS

Jadi Dosen di Unsa, Kini S2 di UNY

Saturday, 24 September 2011 02:45

TIDAK sedikit mantan buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil melanjutkan kuliah dan fokus di jalur pendidikan. Di antaranya Nining Andriani. Dosen Universitas Samawa (Unsa) Sumbawa Besar itu saat ini mengikuti Program Pascasarjana (S2) Universitas Negeri Yogyakarta. "Mengambil pendidikan IPS konsentrasi pendidikan karakter," ujar perempuan yang pernah bekerja di Arab Saudi pada 1992 hingga 1995 ketika dihubungi INDOPOS, tadi malam (23/9).

Bahkan, jika ada kesempatan, perempuan kelahiran Pemangong, Lenangguar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 1974 itu akan terus kuliah hingga S3. "Saya ingin kuliah di luar negeri," kata perempuan yang merencanakan menikah selepas menyelesaikan S2 tersebut. Lulusan S1 pendidikan ekonomi koperasi Unsa itu bercerita, selepas menyelesaikan SMA, sebenarnya ingin langsung melanjutkan kuliah. Namun, karena faktor ekonomi, Nining realistis. Tapi, anak pertama dari tujuh bersaudara itu tidak mau menyerah.

"Sebelum ijazah keluar, saya sudah daftar bekerja di luar negeri. Setelah ijazah keluar saya berangkat. Dengan bekerja, saya ingin mengumpulkan uang, sehingga nanti bisa kuliah. Saya bekerja sebagai baby sitter," terangnya. Selama bekerja di rantau itu, Nining betah di satu majikan. "Majikan orang berpendidikan. Selama bekerja tidak ada masalah. Semua lancar, termasuk gaji. Paspur memang dipegang majikan, tapi saya diajak ke Kuwait, Yordania, dan Suriah. Pembantu lain tidak diajak. Saya merasa diistimewakan, karena bisa menjahit dan mengajari anak majikan. Di situ, selain saya, ada pembantu lain, perempuan dari Sri Lanka. Ada dua sopir dari Bangladesh," jelas Nining yang mengaku saat SMP dia merupakan siswi berprestasi sehingga bisa diterima di SMA favorit di Sumbawa Besar.

Selama 3 tahun bekerja di negara petro dolar, komunikasi dengan keluarga di Indonesia untuk mengobati rasa kangen tak mengalami kendala. "Dengan keluarga baik-baik. Saya kirim surat. Sebenarnya, setelah kontrak habis, saya berkesempatan

melanjutkan kontrak. Tapi saya pilih pulang, ingin kuliah,” ujar perempuan yang bekerja di Riyadh tersebut. Setelah pulang, dengan bekal tabungan selama bekerja di Arab Saudi digunakan mengikuti sejumlah kursus seperti komputer dan bahasa Inggris.

”Saya juga pernah bekerja di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan di kantor kecamatan setempat. Saya kuliah S1 mulai 2002,” ungkapnya. Saat bekerja di kantor Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, ada program kerja sama Pemda Sumbawa dengan lembaga penelitian Universitas Brawijaya, Mitra Karya East Java. Nining ikut terlibat.”Dari kegiatan itu, penghasilan yang saya kumpulkan lumayan untuk biaya kuliah. Kerja sambil kuliah. Saat skripsi saya mundur. Setelah wisuda, saya tidak ada kegiatan selama 6 bulan. Masa transisi. Masuk ajaran baru, saya bergabung di Unsa,” imbuhnya.

Selain di Unsa, Nining juga mengajar di salah satu sekolah tingkat menengah pertama di daerah sana.”Pagi jadi guru, sore harinya jadi dosen. Ketika menjadi pembina Palang Merah Remaja di sekolah tersebut, beberapa juara disabet. Saya mengajar mulai 2007,” terang perempuan yang pada Pemilu 2009 jadi Panwaslucam di Labuhan Badas.

Tiga tahun menjadi dosen, Nining mendapat kesempatan melanjutkan kuliah.”Dapat tugas belajar. Mengajarnya di sekolah ya ditinggal. Saya pilih melanjutkan pendidikan. Saya juga dapat informasi, ada peluang ke Jepang. Kalau diberi kesempatan S3, apalagi ke luar negeri, saya ingin sekali. Meski belum berkeluarga dan merencanakan menikah setelah lulus S2, kalau ada peluang S3, saya ambil. Saya hidup mengalir saja,” jelas Nining yang mendapat sertifikat dari rektor Universitas Negeri Yogyakarta karena merupakan mahasiswa S2 yang ikut terlibat sebagai relawan saat erupsi Gunung Merapi, beberapa waktu lalu.

Lalu apa keinginan ke depan? Dengan ilmu yang dipelajarinya saat ini, Nining ingin mengabdikan diri untuk masyarakat. ”Mengabdikan untuk generasi penerus. Dengan konsentrasi pendidikan karakter, semoga bisa mengabdikan dan mengubah masyarakat lebih baik,” pungkasnya. (zul)s

Perjuangkan Buruh Migran, S2 di Jerman, Ingin Jadi Dosen

Monday, 22 August 2011 14:24

BURUH migran tampaknya begitu lekat dengan Dina Nuriyati. Ini tak lepas dari masa lalu dan aktivitas yang digeluti perempuan asal Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tersebut. Dina mulai merantau ke Hongkong pada 1997. "Sebenarnya selepas SMA, saya ingin kuliah. Tapi melihat kondisi ekonomi orangtua, saya memutuskan bisa membantu dan nantinya bisa mengumpulkan uang buat kuliah. Kakak yang pertama sudah kuliah. Yang kedua sedang menyelesaikan kuliah, kalau saya ikut kuliah, khawatir kakak drop out. Orangtua memang hanya lulusan SD. Tapi, untuk anak-anak, mereka sebisa mungkin untuk memperoleh sekolah yang tinggi. Di samping petani, bapak menambah penghasilan dari menyopir," cerita perempuan 6 bersaudara yang lulus SMA pada 1996 itu. Di Hongkong, Dina bertugas mengurus anak majikan dan membersihkan rumah. Setelah dua tahun, dia ingin pindah majikan. "Saya cari-cari informasi yang dapat bekerja, tapi dapat sampingan.

Ada waktu untuk organisasi juga. Meski saya ikut organisasi, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga tidak boleh terabaikan," jelas Dina yang ketika dihubungi INDOPOS, kemarin (16/8), berada di Malang untuk mudik menyambut Lebaran. Pada hari libur Minggu, Dina memanfaatkan untuk kursus komputer. Di sini dia dapat dua ilmu. Di samping belajar komputer, tutor yang mengajarkan menggunakan bahasa Inggris. Dina pun dapat belajar bahasa Inggris juga."Satu kelas sekitar 40 orang, yang berasal dari Indonesia hanya dua orang. Kursus ini program kerja sama Indonesia Migrant Workers Union (IMWU). Di IMWU saya banyak belajar organisasi. Di sini ada pendidikannya, ada advokasinya. Ini organisasi serikat buruh, legal di Hongkong," ungkapnya. Di IMWU ini, Dina pernah dikirim ke Taiwan dan Nepal. Di Nepal, mengikuti konferensi dunia terkait HAM. "Saya bisa mengikuti ini, karena kalau pas lagi ada acara, saya ngambil libur mingguan saya. Tidak libur mingguan dulu beberapa waktu, diambil libur pas ada acara di organisasi," terangnya.

Dengan berorganisasi, Dina tahu lebih banyak. Dia mengaku bisa mengembangkan diri, mengetahui haknya sebagai pekerja atau buruh migran dan bagaimana berkomunikasi dengan majikan. "Di IMWU saya juga banyak teman dan tambah skill," imbuhnya. Selain itu, Dina juga mengambil pelajaran di Hongkong. Di samping kebersihan juga disiplin tinggi. Dina pulang dari Hongkong pada 2001. Dia memutuskan pulang, karena ingin melanjutkan kuliah. "Tiga tahun pertama, gaji masih untuk keluarga. Baru tahun keempat, bisa nabung. Kalau kerja diterusin, tidak

ada habisnya. Harus punya target,” ujarnya. Tidak lama berselang setelah pulang, karena bertepatan dengan pendaftaran perkuliahan, Dina langsung mendaftar di Universitas Kanjuruhan Malang. Dia mengambil bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. ”Saya mengambil bahasa Inggris, karena bisa membuka kursus. Lumayan ada pemasukan. Selain itu, juga beli truk yang dioperasikan orangtua. Saya juga menunggu perpustakaan.

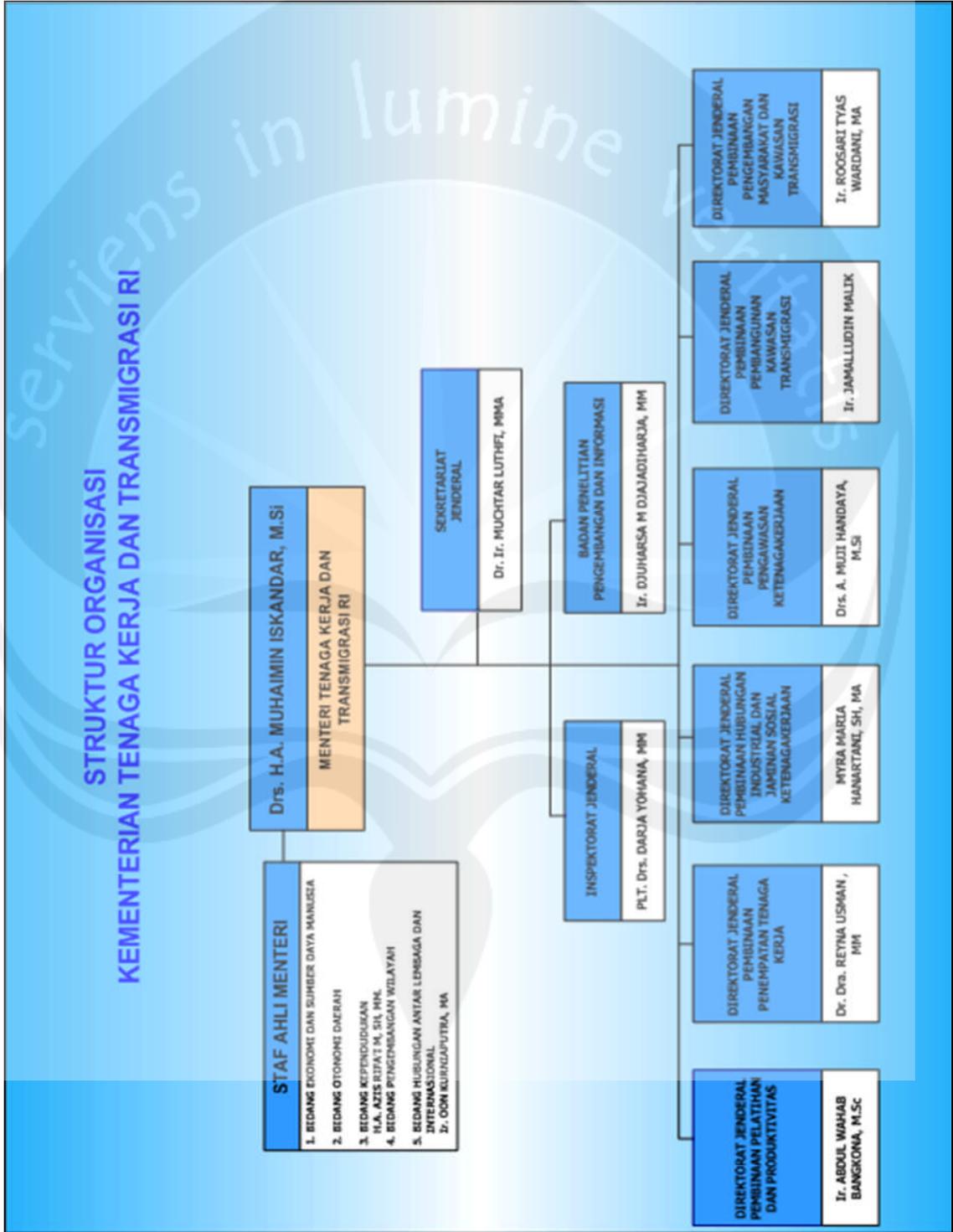
Kuliah saya mandiri,” terang perempuan kelahiran 1978 itu. Jiwa organisasi yang berhubungan dengan buruh migran juga tak bisa dia pisahkan. Pada 2001 ada pertemuan buruh migran di Jakarta. Akhirnya mendirikan Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Dina dipercaya menjadi ketua pusat FOBMI periode 2003—2005.”Saya awalnya bolak-balik, Malang-Jakarta, karena kuliah di Malang. Bahkan sempat cuti satu semester. Tapi berusaha kuliah tetap jalan, dan bisa pegang amanat. Pada 2006 selesai kuliah. Pada 2005 bergabung di Dewan Pertimbangan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia hingga Juli 2011,” jelas perempuan yang menikah pada 2008 dan kini dikaruniai seorang anak itu. Selepas S1, Dina bekerja di yayasan politik asal Jerman, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Jakarta sebagai program officer Aceh selama 1,5 tahun.

Setelah mendapat beasiswa belajar S2 di Jerman, Dina mengundurkan diri di FES. ”Menempuh S2 di Global Labour University (GLU) jurusan Labour Policies and Globalization untuk kampus University of Kassel dan Berlin School of Economic di Jerman. Setelah selesai dengan gelar Master of Arts (M.A), diajak bergabung di International Center for Development and Development and Decent Work (ICDD) yang berkantor pusat di Jerman,” jelas perempuan yang tinggal bersama anak dan suaminya yang bekerja di kantor pengacara, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu. Meski aktivitasnya padat, ketika dihadapkan dengan keluarga, Dina memilih keluarga. Keluarga baginya nomor satu. ”Waktu saya hamil, ada beberapa undangan di antaranya ke luar negeri, ada beberapa penelitian, tapi saya pilih hamil dulu.

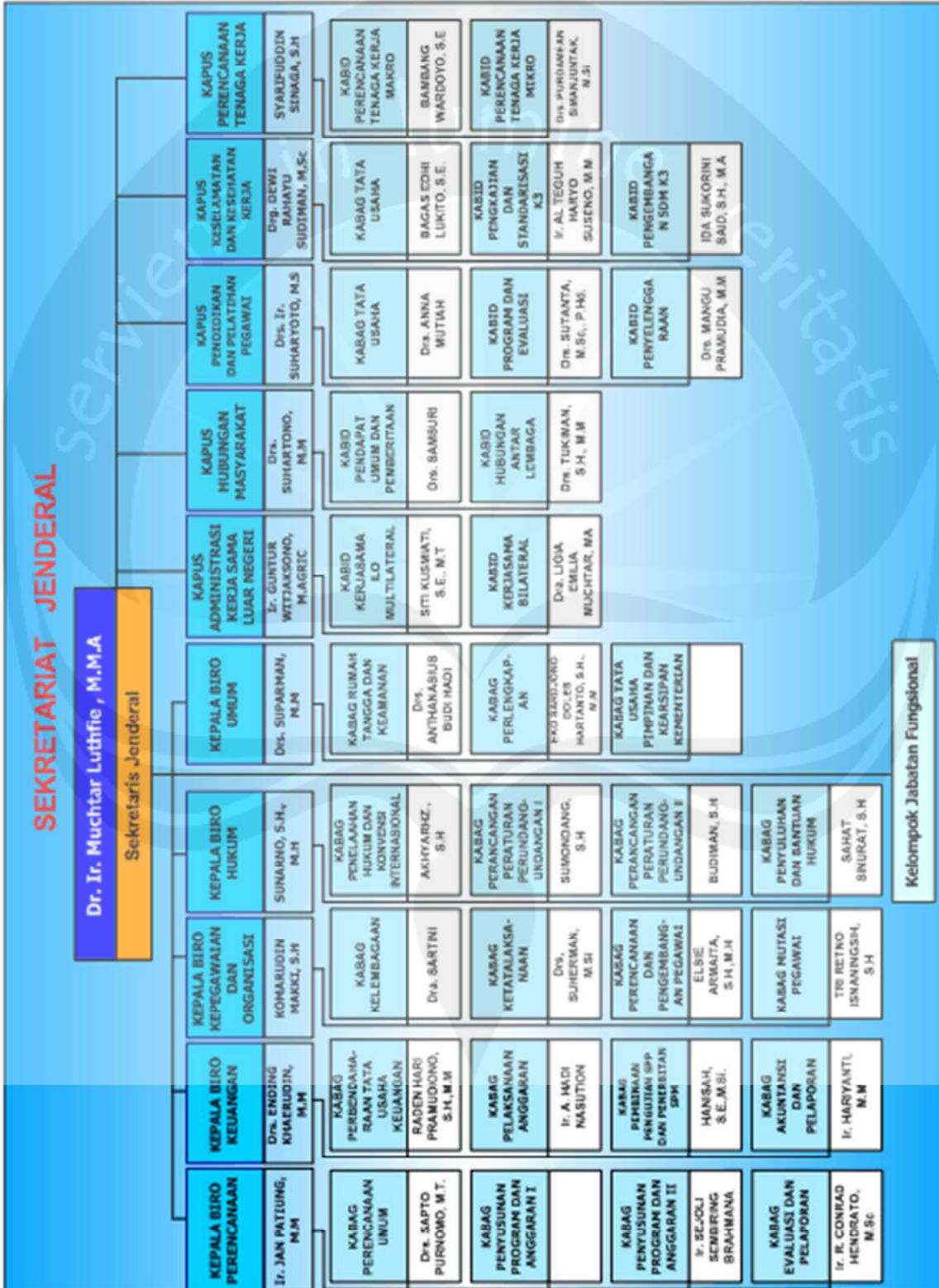
Begitu juga ketika anak masih menyusu dan butuh perhatian. Memang masih di SBMI, tapi dikurangi. Begitu juga di ICDD,” terang perempuan yang masih mempertimbangkan untuk menjadi dosen di Malang itu. Apa harapannya ke depan? Dina mengaku ingin jadi dosen atau guru dan berjuang di jalur buruh migran.”Kalau tidak bisa aktif di SBMI pusat ya di Malang. Di Malang dekat dengan orangtua,” harapnya. Dia juga berharap, pemerintah menyediakan perangkat dan hak-hak buruh migran.”Tidak asal ngirim orang. Siapa pun yang memutuskan berangkat ke luar negeri juga harus siap. Cari informasi lengkap. Makanya harus dipikir masak-masak sebelum berangkat,” pungkasnya. (zul)

<http://www.indopos.co.id/index.php/index-iki-sukses/14978-perjuangan-buruh-migran-s2-di-jerman-ingin-jadi-dosen.html>

LAMPIRAN VII



LAMPIRAN VIII



PKS: Copot Menlu dan Menakertrans



Oleh Willy Widiyanto | TRIBUNnews.com – 16 jam yang lalu

Konten Terkait

Makam Ruyati Ada di Dekat Makam Istri Pertama Nabi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR sangat menyesalkan sikap pemerintah yang lamban dan lalai memberikan perlindungan kepada TKI sehingga menyebabkan terjadinya hukum pancung bagi TKI Ruyati di Kerajaan Arab Saudi pada Hari Sabtu, 18 Juni 2011.

Kecaman ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Arif Minardi di DPR, Senin (20/6/2011) .

“Kalau perlu ganti saja Menteri Luar Negeri dan Menakertrans kita karena tidak bisa melindungi TKI kita di luar negeri. Perlu diingat masih ada 23 orang TKI yang sedang menunggu vonis di pengadilan Kerajaan Arab, jumlah itu diluar dengan beberapa TKI yang sudah menerima vonis termasuk Darsem,” tegas Arif .

Ruyati adalah TKI asal Bekasi Jawa Barat. Ruyati berangkat kerja ke Arab Saudi dengann menggunakan PJTKI PT. Dasa Graha Utama. Ruyati mendapat tuduhan membunuh ibu majikannya. Sedangkan motif pembunuhannya karena rasa kesal akibat sering dimarahi oleh korban dan karena gajinya yang belum dibayarkan selama tiga bulan sebesar SR 2400.

Bahkan sebenarnya Ruyati sudah sering untuk meminta untuk dipulangkan saja ke Indonesia. Setelah menghadiri dua kali sidang pada tahun 2010, pada bulan Mei 2011, Ruyati divonis qisas (artinya membunuh dijatuhi hukuman dibunuh).

Politsi PKS ini juga mengingatkan kembali soal vonis TKI lainnya, Darsem, yang juga menghadapi ancaman hukuman mati.

” Jika sampai tanggal 7 Juli 2011 tidak ada dana yang sebesar Rp. 4,7 miliar maka nasib Darsem akan sama dengan Ruyati, jadi saya mendesak Pemerintah segera menalangi dana tersebut agar secepatnya Darsem dapat segera bebas dan kembali ke tanah air,” pungkasnya.

LAMPIRAN X Artikel Liputan6.com

Presiden Diminta Mengganti Menakertrans

LIPUTAN 6 *Liputan 6 – 16 jam yang lalu*

Liputan6.com, Jakarta: Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arif Minardi yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI sangat menyesalkan sikap pemerintah yang lamban dan lalai dalam memberikan perlindungan kepada TKI. Ini membuat TKI Ruyati binti Satubi harus mengalami hukum pancung di Arab Saudi, Sabtu silam.

Terkait hal tersebut, Arif mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. "Kalau perlu ganti saja Menteri Luar Negeri dan Menakertrans kita karena tidak bisa melindungi TKI kita di luar negeri. Perlu diingat masih ada 23 orang TKI yang sedang menunggu vonis di pengadilan Kerajaan Arab, jumlah itu di luar dengan beberapa TKI yang sudah menerima vonis termasuk Darsem," tegas Arif dalam siaran persnya, Senin (20/6).

Ruyati adalah TKI asal Bekasi, Jawa Barat. Dia berangkat kerja ke Arab Saudi dengann menggunakan PJTKI PT. Dasa Graha Utama. Ruyati mendapat tuduhan membunuh ibu majikannya. Sedangkan motif pembunuhannya karena rasa kesal akibat sering dimarahi oleh korban dan karena gajinya yang belum dibayarkan selama tiga bulan sebesar SR 2.400.

Sebenarnya, lanjut Arif, Ruyati sudah sering meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Setelah menghadiri dua kali sidang pada tahun 2010 dan pada Mei 2011, Ruyati divonis qisas yang artinya membunuh dijatuhi hukuman dibunuh.

Lebih jauh Politsi PKS ini juga mengingatkan kembali soal vonis TKI lainnya, yang bernama Darsem, yang juga sedang menghadapi ancaman hukuman mati. "Jika sampai tanggal 7 Juli 2011 tidak ada dana yang sebesar Rp 4,7 miliar maka nasib Darsem akan sama dengan Ruyati. Jadi saya mendesak pemerintah segera menalangi dana tersebut agar secepatnya Darsem dapat bebas dan kembali ke Tanah Air," pungkasnya.(ADM/ULF).

HARI BURUH: 5.000 buruh Tangerang Raya siap serbu Jakarta

Oleh Newswires

Selasa, 01 Mei 2012 | 09:57 WIB



TANGERANG: Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya akan ke Jakarta pada hari Selasa untuk ikut memperingati Hari Buruh se-Dunia atau "May Day" guna berorasi menuntut kesejahteraan.

"Kami meminta pemerintah menghapus kebijakan yang merugikan para buruh," kata Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Rideh Hatam, Selasa.

Rideh Hatam mengatakan selama ini kehidupan buruh belum sejahtera karena banyak perusahaan yang menggaji di bawah standar upah minimum kota (UMK).

Selain itu juga buruh menuntut untuk dihapuskan sistem tenaga kerja kontrak atau outsourcing.

Dia juga mengatakan, aksi turun ke jalan menggelar orasi di sejumlah lokasi di Jakarta, di antaranya di Bundaran Hotel Indonesia.

"Kami menjamin aksi turun ke jalan secara damai dan tertib tanpa kekerasan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Tangerang, Koswara mengatakan mereka pekerja yang akan bertolak ke Jakarta menuntut kesejahteraan, karena selama ini perusahaan masih mengabaikan hak-hak para buruh tersebut.

"Kami minta tuntutan para buruh itu dapat direalisasikan pemerintah," jelasnya. Koswara menegaskan pihaknya menjamin peringatan "May Day" berjalan tertib dan damai. (Antara/ea)



HARI BURUH: Serikat Pekerja PT DI Siap Demo Buruh Di Jakarta

Senin, 30/4/2012 | JIBI/SOLOPOS/dtc | Dilihat: 2118 Kali



Aceh, Senin (30/4/2012).

Keberangkatan mereka di halaman kantor tersebut dilepas Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan. Ada sekitar 100 unit sepeda motor yang turut ikut dalam konvoi ini. Rute konvoi melalui jalur Bandung-Cimahi-Bandung Barat-Cianjur-Bogor-Depok.

“Nanti kami menginap semalam di Bumi Perkemahan Ragunan. Selanjutnya atau esok hari bergabung dengan massa buruh di Jakarta. Besok rencananya, buruh long march dari Bundaran HI ke Istana Presiden. Terus siang ke Gelora Bung Karno,” jelas Darta.

Tuntutan SP-FKK PT DI sama dengan kelompok buruh lainnya. Mereka menuntut antara lain hapuskan outsourcing, laksanakan jaminan sosial, dan batalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua DPRD Kota Bandung dalam sambutannya di atas mobil bak terbuka yang dibawa massa, mendukung penuh segala tuntutan kaum buruh.

BANDUNG– Massa SP-FKK PT Dirgantara Indonesia (DI) siap memperingati Hari Buruh Internasional atau dikenal May Day. Mereka berangkat naik sepeda motor dari Kota Bandung untuk bergabung dengan buruh lainnya di Jakarta pada Selasa (1/5/2012) besok.

“Perwakilan kami akan konvoi menggunakan sepeda motor ke Jakarta untuk memperingati May Day besok,” kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga & Organisasi SP-FKK PT DI, M Sidarta, saat ditemui di halaman kantor DPRD Kota Bandung, Jalan

“Semoga aspirasi buruh terwujud. Kami dari DPRD Kota Bandung siap mengawal aspirasi buruh terkait jaminan sosial dan lainnya,” kata Erwan melalui pengeras suara.

Erwan berpesan agar buruh yang berangkat ke Jakarta ini memperhatikan keselamatan dan keamanan selama perjalanan. Sekitar pukul 09.50 WIB, massa dilepas Erwan sembari mengibaskan bendera SP FKK PT.DI. Massa dikawal sepeda motor polisi.

